KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:4787-4580-3863-5006

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2026

NOMOR : SP DIPA- 005.03.2.099226/2026

A. Dasar Hukum:

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(005)	MAHKAMAH AGUNG
2. Unit Organisasi	:	(03)	Ditjen Badan Peradilan Umum
3. Provinsi	:	(11)	SUMATERA SELATAN
4. Kode/Nama Satker	:	(099226)	PENGADILAN NEGERI PALEMBANG
Sebesar	:	Rp. 602.340.000	(ENAM RATUS DUA JUTA TIGA RATUS EMPAT PULUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.04	PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :		Jumlah Uang	
005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	602.340.000
005.03.BF.1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp.	602.340.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	602.340.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN PALEMBANG	(014)	Rp.	602.340.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099226/2026
I A. INFORMASI KINERJA

DS:4787-4580-3863-5006

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
Kode/Nama Satker : (099226) PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

Program	:	005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	602.340.000
Kegiatan	:	1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	602.340.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi penyelesaian perkara perdata tepat waktu pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan umum	
		2. 01	Jumlah Perkara di Lingkungan Peradilan Umum di Tingkat Banding Yang diselesaikan Tepat Waktu	
		3. 01	Jumlah SDM Tenaga Teknis yang mengikuti Bimbingan Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	
		4. 01	Jumlah kegiatan koordinasi dan pembinaan di Lingkungan Peradilan Umum	
		5. 01	Jumlah pengguna layanan pos bantuan hukum di Lingkungan Peradilan Umum	
		6. 01	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara dilingkungan Peradilan Umum	
		7. 02	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi penyelesaian perkara perdata tepat waktu tingkat pertama di lingkungan peradilan umum	
		8. 02	Jumlah Perkara di Lingkungan Peradilan Umum di Tingkat Pertama Yang diselesaikan Tepat Waktu	
		9. 02	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung dilingkungan Peradilan Umum	
		10. 03	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju di lingkungan peradilan umum	
		11. 04	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	
		12. 05	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi pengiriman petikan/pemberitahuan isi putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	
		13. 06	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	
		14. 07	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan di lingkungan peradilan umum	
		15. 08	Jumlah Pelaksanaan Penyelesaian Permohonan eksekusi putusan perdata pada lingkungan peradilan umum	
		16. 09	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi perkara yang berhasil diputus dengan pendekatan keadilan restoratif di lingkungan peradilan umum	
		17. 10	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi penyelesaian perkara yang berhasil melalui mediasi	
		18. 11	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi penyelesaian perkara anak yang berhasil melalui diversi	
		19. 12	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelesaian perkara perdata yang menggunakan e-Court	
		20. 13	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099226/2026
I A. INFORMASI KINERJA

DS:4787-4580-3863-5006

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
Kode/Nama Satker : (099226) PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

21. 14 Jumlah Pelaksanaan Koordinasi layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)

22. 15 Jumlah Pelaksanaan Koordinasi upaya hukum banding perkara perdata di pengadilan yang menggunakan e-Court

Klasifikasi Rincian Output	1	:	1049.AEA	Koordinasi		2,00	kegiatan	1.500.000
Rincian Output		:	01 AEA.001	Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum		2.00	kegiatan	1.500.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan		1.290,00	Perkara, Berkas Perkara	563.040.000
Rincian Output		:	01 BCA.U03	Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Barat		1050.00	Perkara	349.500.000
			02 BCA.U04	Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Barat		90.00	Perkara	78.840.000
			03 BCA.U05	Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di wilayah Barat		150.00	Perkara	134.700.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan		300,00	Orang	36.000.000
Rincian Output		:	01 QBA.032	Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum	(PN)	300.00	Orang	36.000.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	1049.QCA	Perkara Hukum Perseorangan		5,00	Perkara, Berkas Perkara	1.800.000
Rincian Output		:	01 QCA.001	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	(PN)	5.00	Perkara	1.800.000

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.

H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099226/2026

DS:4787-4580-3863-5006

I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
Kode/Nama Satker : (099226) PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

						Pagu		Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2026	Rp.	602.340.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$ 0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	602.340.000			(2) RPLN	US$ 0	Rp.	0
2. PNBP	Rp.			b. Hibah Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$ 0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0			(2) RHLN	US$ 0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri		IDR 0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri		IDR 0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung		IDR 0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung		IDR 0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri		PAGU TAHUN INI 1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN 1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099226/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN

DS:4787-4580-3863-5006

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
Kode/Nama Satker : (099226) PENGADILAN NEGERI PALEMBANG
Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
099226	**PENGADILAN NEGERI PALEMBANG**	**-**	**602.340**	**-**	**-**	**-**	**602.340**		
005.03.BF	**Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**	**-**	**602.340**	**-**	**-**	**-**	**602.340**		
1049	**Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**	**-**	**602.340**	**-**	**-**	**-**	**602.340**		
1049.AEA	Koordinasi	-	1.500	-	-	-	1.500	11 . 51	
	(11.51 SUMATERA SELATAN / KOTA PALEMBANG)								
01	RM	-	1.500	-	-	-	1.500	014	
1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan	-	563.040	-	-	-	563.040	11 . 51	
	(11.51 SUMATERA SELATAN / KOTA PALEMBANG)								
01	RM	-	563.040	-	-	-	563.040	014	
1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	-	36.000	-	-	-	36.000	11 . 51	
	(11.51 SUMATERA SELATAN / KOTA PALEMBANG)								
01	RM	-	36.000	-	-	-	36.000	014	
1049.QCA	Perkara Hukum Perseorangan	-	1.800	-	-	-	1.800	11 . 51	
	(11.51 SUMATERA SELATAN / KOTA PALEMBANG)								

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099226/2026

DS:4787-4580-3863-5006

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
Kode/Nama Satker : (099226) PENGADILAN NEGERI PALEMBANG
Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	RM	-	1.800	-	-	-	1.800	014	
	JUMLAH	**-**	**602.340**	**-**	**-**	**-**	**602.340**		

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099226/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DS:4787-4580-3863-5006

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
Kode/Nama Satker : (099226) PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**099226**	**PENGADILAN NEGERI PALEMBANG**													
		RENCANA PENARIKAN DANA	50.175	50.175	50.175	50.175	50.175	50.175	50.175	50.175	50.175	50.175	50.175	50.415	602.340
		BELANJA BARANG	50.175	50.175	50.175	50.175	50.175	50.175	50.175	50.175	50.175	50.175	50.175	50.415	602.340
	005.03.BF.1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	50.175	50.175	50.175	50.175	50.175	50.175	50.175	50.175	50.175	50.175	50.175	50.415	602.340
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	50.175	50.175	50.175	50.175	50.175	50.175	50.175	50.175	50.175	50.175	50.175	50.415	602.340
		PERKIRAAN PENERIMAAN	13.405	13.405	13.405	13.405	13.405	13.405	13.405	13.405	13.405	13.405	13.405	13.424	160.879
		- PNBP (425231)	319	319	319	319	319	319	319	319	319	319	319	321	3.830
		- PNBP (425232)	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	175	1.990
		- PNBP (425233)	3.414	3.414	3.414	3.414	3.414	3.414	3.414	3.414	3.414	3.414	3.414	3.416	40.970
		- PNBP (425239)	9.507	9.507	9.507	9.507	9.507	9.507	9.507	9.507	9.507	9.507	9.507	9.512	114.089

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099226/2026
IV A. B L O K I R

DS:4787-4580-3863-5006

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [03] Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : [11] SUMATERA SELATAN
Kode dan Nama Satker : [099226] PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099226/2026
IV B. C A T A T A N

DS:4787-4580-3863-5006

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [03] Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : [11] SUMATERA SELATAN
Kode dan Nama Satker : [099226] PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002